

Pendidikan Politik Pemilih Muda oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung melalui Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) jelang Pemilihan Umum 2024

Syakira Syafiqya Tsabita Putri Hartono, Yusa Djuyandi

*Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
syakira20001@mail.unpad.ac.id*

Abstrak

Pendidikan politik merupakan proses yang krusial dan melekat pada KPU, ditujukan untuk memastikan pemilih memahami esensi dilaksanakannya pemilu dan dampaknya bagi demokrasi. Salah satu segmentasi pemilih yang berperan besar bagi pemilu di Indonesia adalah pemilih muda. Pendidikan politik bagi pemilih muda di Kota Bandung dalam rangka mendorong kesadaran dan kepribadian politik dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan pemanfaatan Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara sebagai sumber data primer, studi literatur dan dokumentasi sebagai sumber data sekunder. Teknik wawancara menggunakan teknik purposive, informan berasal dari KPU Kota Bandung dan pemilih muda yang pernah berkunjung ke RPP KPU Kota Bandung. Teknik analisis data dilakukan dengan teknik Miles dan Huberman yaitu dengan proses reduksi, penyajian data, dan verifikasi. Proses triangulasi data juga dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data. Hasil dari penelitian menunjukkan pendidikan politik melalui RPP KPU Kota Bandung kepada pemilih muda dilakukan dengan pengadaan secara fisik dan juga digitalisasi materi-materi politik. Aktualisasinya, RPP juga menyediakan informasi sesuai kebutuhan pemilih muda. Proses pendidikan politik melalui RPP KPU Kota Bandung memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pemahaman, kesadaran, dan kepribadian politik pemilih muda khususnya dalam agenda pemilu serentak 2024.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Rumah Pintar Pemilu, Pemilih Muda, KPU Kota Bandung.

Abstract

Political education is a crucial process and is attached to the KPU, aimed at ensuring voters understand the essence of holding elections and their impact on democracy. One of the voter segments that plays a big role in elections in Indonesia is young voters. Political education for young voters in Bandung City in order to encourage political awareness and personality can be done in various ways, one of which is by using the Bandung City KPU Election Smart House (RPP). This research uses qualitative research methods with interviews as primary data sources, literature studies and documentation as secondary data sources. The interview technique used a purposive technique, informants came from the Bandung City KPU and young voters who had visited the Bandung City KPU RPP. The data analysis technique was carried out using the Miles and Huberman technique, namely the process of reduction, data presentation and verification. The data triangulation process in this research also uses data source triangulation. The results of the research show that political education through the Bandung City KPU RPP for young voters is carried out by physically procuring and also digitizing political materials. In actualization, the RPP also provides information according to the needs of young voters. The political education process through the Bandung City KPU RPP has had a significant impact on the understanding, awareness and political personality of young voters, especially in the 2024 simultaneous election agenda.

Keywords: *Political Education, Election Smart House, Young Voters, Bandung City KPU.*

Pendahuluan

Sebagai salah satu sistem politik yang pada era modern kini sebagian besar negara-negara di dunia menerapkannya, sistem demokrasi dipandang sebagai sistem yang lebih baik daripada sistem lainnya karena berorientasi pada rakyat. Berasal dari bahasa Yunani “*demos*” yang artinya rakyat dan “*kratos*” yang artinya berkuasa. Sehingga secara sederhana, demokrasi berarti kekuasaan rakyat atau *government or rule by the people* (Santoso & Budhiati, 2019).

Indonesia sebagai negara dengan sistem politik demokrasi mengadopsi konsep demokrasi perwakilan

dengan melakukan pemilu presiden dan wakil presiden serta memilih anggota legislatif setiap lima tahun sekali. Pemilu hakikatnya terdiri dari empat tujuan utama, yaitu: 1) sarana bagi rakyat untuk menyalurkan suaranya; 2) membentuk pemerintahan yang akuntabel dan transparan; 3) pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat; dan 4) sebagai sarana refleksi dari diterapkannya konsep demokrasi di suatu negara (Djuyandi, 2018). Aktualisasi pemilihan umum di Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam merumuskan

regulasi, pelaksanaan, hingga evaluasi pemilihan. Tiga lembaga yang berperan dalam menjalankan segala tahapan pemilihan di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Salah satu peran dan tugas terpenting dari KPU adalah untuk memastikan bahwa setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam pemilu selama memenuhi syarat yang berlaku. Partisipasi politik masyarakat sebagai pemilih harus diimbangi dengan kualitas pemahaman masyarakat akan pemilihan, sehingga penting bagi KPU untuk memastikan pemilih mampu memahami makna pemilu dan proses tahapan pemilu dengan baik. Pemilih yang cerdas berpotensi menghasilkan pemilu yang berkualitas, sehingga secara tidak langsung akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang duduk dalam kursi kekuasaan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui sosialisasi politik, pendidikan politik bagi pemilih, survey atau jajak pendapat tentang pemilu, dan perhitungan cepat hasil pemilu (*quickcount*) (MKRI, 2017). Berdasarkan undang-undang inilah KPU memiliki peran untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada pemilih dalam rangka menciptakan pemilih yang cerdas dan juga sebagai upaya

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Dalam melakukan pendidikan pemilih, terdapat beberapa segmentasi atau kelompok prioritas yang menjadi sasaran dalam proses pendidikan politik. KPU dalam buku "*Pedoman Pendidikan Pemilih*" mengklasifikasikan kelompok sasaran pendidikan pemilih ke dalam dua bagian, yaitu: 1) Kelompok pemilih rentan; dan 2) Kelompok pemilih strategis (Manik et al., 2015). Kelompok pemilih rentan merupakan kelompok yang berada di daerah atau memiliki kondisi khusus yang menjadikan mereka rentan terhadap masalah yang meliputi penyelenggaraan pemilihan (Manik et al., 2015). Sedangkan kelompok pemilih strategis ialah salah satu komponen masyarakat yang diutamakan dalam proses pendidikan pemilih karena besaran jumlah atau posisinya berada dalam posisi yang cukup strategis bagi pemilihan. Setidaknya terdapat lima kelompok yang masuk ke dalam segmentasi pemilih strategis, yaitu kelompok disabilitas, kelompok pra-pemilih, kelompok perempuan, kelompok agamawan/rohaniawan, dan kelompok pemilih pemula (Manik et al., 2015).

Kelompok pemilih pemula, khususnya pemilih muda yang berusia 17-21 tahun seringkali dijadikan sasaran utama dalam memperoleh suara oleh peserta pemilu. Ada beberapa gagasan yang

mendorong argumentasi ini, yaitu: *pertama*, jumlah pemilih muda di setiap periode pemilihan cenderung besar, hal ini mendorong peserta pemilu berlomba mendapatkan suara pemilih muda untuk memenangkan pemilu. *Kedua*, pemilih muda cenderung masih awam dan belum memahami secara mendalam mengenai makna demokrasi, urgensi pemilu, hingga pelaksanaan teknis dan administratif pemilihan. Sehingga pilihan suara mereka cenderung masih berdasarkan kepada keputusan yang dipengaruhi faktor-faktor eksternal dan cenderung berubah-ubah (Rahmat, 2023).

KPU memiliki peran yang krusial dalam menjalankan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Ada banyak cara dan sarana bagi KPU untuk melakukan pendidikan pemilih, salah satu alternatifnya adalah dengan pemanfaatan Rumah Pintar Pemilu (RPP). Rumah Pintar Pemilu merupakan konsep dari perwujudan pendidikan pemilih oleh KPU dengan memanfaatkan ruang dari suatu bangunan ataupun melalui *platform* digital. Rumah Pintar Pemilu hadir untuk memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat terkait urgensi dan esensi dari pemilu serta demokrasi. Melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP), program dan aktivitas yang ditujukan untuk mengedukasi masyarakat dapat dilaksanakan secara interaktif (KPU Kabupaten Ciamis, 2017). Rumah Pintar Pemilu diinisiasi pada tahun 2015 oleh KPU RI dengan berada di bawah naungan divisi Sosialisasi,

Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat. Pembentukan RPP sendiri terjadi secara berangsur-angsur, dengan diawali 9 KPU Provinsi dan 18 KPU Kabupaten/Kota yang menjadi *pilot project* pembentukan RPP di tahun 2015. Kemudian di tahun-tahun berikutnya, pembentukan RPP mulai dilaksanakan hampir di seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia (KPU RI, 2015). RPP memfasilitasi masyarakat yang berkunjung dengan berbagai informasi, pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman terkait urgensi pemilihan umum dan juga demokrasi (KPU Kabupaten Ciamis, 2017). Sehingga dengan hadirnya RPP, pendidikan pemilih dapat terus dilakukan kapanpun tanpa agenda-agenda khusus, melainkan hanya dengan kunjungan masyarakat ke kantor KPU atau RPP, pendidikan pemilih sudah dapat dilaksanakan. Hal ini menjadi suatu komitmen KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu untuk terus memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat terkait konteks pemilihan dan demokrasi.

Kota Bandung menjadi menarik dalam tiap pelaksanaan pemilihan umum karena selain sebagai ibu kota provinsi, Kota Bandung seringkali menjadi salah satu kota dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan jumlah DPT terbesar. Selain itu, di tahun 2019 target capaian partisipasi yang telah ditetapkan oleh KPU RI yaitu sebesar 77,5%, dan Kota Bandung mampu

melampaui target dengan perolehan partisipasi sebesar 86%.

Tingginya tingkat partisipasi di Kota Bandung merupakan lampu hijau yang menandakan bahwa masyarakat Kota Bandung telah memahami perannya sebagai warga negara. Selain itu, hal ini membuktikan bahwa banyak warga Kota Bandung yang sudah memiliki pemahaman akan pentingnya pemilu dan penerapan proses demokrasi di Indonesia. Namun, tingginya tingkat partisipasi di Kota Bandung pada pemilu 2019 juga menjadi kontradiksi atau tantangan khusus bagi pemilu yang akan datang yaitu di tahun 2024. Pasalnya, capaian KPU RI pada tahun 2019 berkisar di angka 77,5% sedangkan target ini meningkat hingga mencapai 82% di pemilu 2024 (Warid, 2023). Walaupun pada tahun 2019 di Kota Bandung berhasil memperoleh 86% dan masih lebih tinggi dari capaian target 2024 yang ditentukan KPU RI, hal ini menjadi permasalahan atau tantangan tersendiri bagi KPU Kota Bandung. Tentu target minimal partisipasi yang harus dipenuhi oleh KPU Kota Bandung setidaknya adalah stagnan atau tidak berubah dari tahun 2019. Maka dari itu, walaupun jumlah partisipasi bukan menjadi kekhawatiran di Kota Bandung, namun mempertahankan dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat menjadi problem atau tantangan yang cukup serius. Belum lagi penambahan jumlah Daftar

Pemilih Tetap (DPT) dan banyaknya pemilih muda yang berpartisipasi dalam pemilu 2024 yang akan datang, diperlukan perhatian khusus oleh KPU Kota Bandung untuk memastikan bahwa pemilih muda ini siap untuk ikut berkontribusi secara aktif dalam pemilihan umum.

Selain permasalahan partisipasi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, praktik politik uang menjadi salah satu perhatian khusus dalam tiap pelaksanaan kepemiluan. Politik uang di Jawa Barat tersebar di beberapa kabupaten/kota, salah satunya terjadi di Kota Bandung. Menjelang pemilu 2024, pelanggaran kampanye dengan praktik politik uang juga terjadi di kota Bandung, di mana calon anggota legislatif beserta tim pemenangannya memberikan uang atau minyak goreng saat pelaksanaan kampanye (Costa, 2023). Pemilih muda lagi-lagi menjadi salah satu target utama para peserta pemilu dalam menggunakan praktik politik uang. Banyak pemilih muda yang mudah tergiur hadiah-hadiah yang walaupun secara nominal kecil dianggap menguntungkan bagi para kalangan muda, sehingga mereka menjadi rawan akan serangan politik uang (Hidayat, 2023).

Selain praktik politik uang, permasalahan yang meliputi pelaksanaan pemilu 2024 di Kota Bandung adalah banyaknya hal-hal fundamental yang dapat berpengaruh terhadap antusiasme masyarakat

untuk ikut serta dalam pemilu, seperti berita hoax dan ancaman tingginya GolPut. Pada pemilu 2019 di kota Bandung, terdapat aksi yang dilakukan beberapa golongan masyarakat untuk menyuarkan GolPut. Hal ini didorong dengan pemikiran bahwa pemilu di Indonesia tidak berpihak pada rakyat, hanya proses perebutan kekuasaan oleh para oligarki yang tidak mementingkan kehendak dan kepentingan rakyat, sehingga kelompok ini mendeklarasikan diri untuk abstain dalam pemilu 2019 (BandungKiwari, 2019). Di tahun 2024, potensi GolPut juga menghantui pelaksanaan pemilu kota Bandung, di mana antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu menurun terlebih saat ada kasus penangkapan walikota kota Bandung yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Di mana banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat menjadikan calon pemilih ragu untuk menyumbangkan suaranya dalam pemilu karena merasa tidak memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa. Selain itu, pemilih cenderung pesimis terhadap para calon wakil rakyat yang akan mewakilinya, mereka berpikir bahwa politik itu kotor dan para calon wakil rakyat juga bertendensi melakukan pelanggaran setelah terpilih (Herdiana, 2023). Fenomena pemilu di kota Bandung pun pada dasarnya tidak serta merta terhindar dari berbagai berita bohong (*hoax*). Baik dalam pemilu 2019, maupun menjelang pemilu 2024,

permasalahan *hoax* selalu menghantui proses pemilu dan terkadang digunakan sebagai senjata dalam menjatuhkan salah satu pihak. Penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi tercepat memberikan dampak positif dan negatif bagi perkembangan pengetahuan masyarakat khususnya terkait kepemiluan.

Dari beragam fenomena politik yang mewarnai pelaksanaan pemilu di Kota Bandung, menjadi penting bagi KPU Kota Bandung untuk melakukan pendidikan politik dalam rangka mewujudkan kesadaran dan pemahaman pemilih muda terhadap fenomena politik. Selain itu, pendidikan politik ini dapat mendorong keikutsertaan pemilih muda dalam tiap-tiap agenda kenegaraan, sehingga nantinya dapat terbentuk karakteristik pemilih cerdas. Pendidikan politik ini dapat dilakukan melalui RPP KPU Kota Bandung.

Untuk mengkaji fenomena dan proses pendidikan politik KPU Kota Bandung melalui RPP, teori pendidikan politik Ruslan digunakan sebagai acuan untuk memahami secara rinci mulai dari proses, program, hingga dampak pendidikan politik. Ruslan (2000) secara rinci menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan suatu upaya yang dilakukan sebuah lembaga baik formal atau nonformal untuk memberikan pemahaman, membentuk suatu kepribadian politik warga negara yang dirasa sesuai dengan kultur atau sistem politik

negara, atau sesuai dengan standar tertentu. Sehingga pada akhirnya warga negara mampu berkontribusi dalam agenda politik dengan kesadaran dan penuh pertimbangan. Selain itu, pendidikan politik menurut Ruslan berpeluang membentuk warga negara yang mampu memberikan solusi atas problematika yang ada dengan cara-cara yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif, sehingga tindakan tersebut dapat menciptakan suatu kebijakan atau kondisi yang lebih baik (dalam Handoyo & Lestari, 2017). Tujuan utama pendidikan politik bagi Ruslan adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki kesadaran akan fenomena atau agenda politik dan berangkat dari kesadaran itulah masyarakat mampu membentuk kepribadian politik. Kepribadian politik menurut Ruslan merupakan sebuah reaksi seseorang yang terbentuk karena daya tangkap, pandangan, pemahaman, dan kesadaran seseorang akan politik serta isu-isu di dalamnya.

Ruslan menjelaskan bahwa sosialisasi politik melalui pendidikan pemilih dilakukan secara berangsur-angsur hingga menciptakan kondisi di mana pemilih memiliki kesadaran politik dan mampu mengambil keputusan-keputusan politis sehingga menjadi sebuah kebiasaan atau kepribadian politik. Sehingga berdasarkan gagasan Ruslan (2000), setidaknya dapat dilihat bahwa ada tiga indikator utama dalam

keberhasilan pendidikan politik, yaitu: 1) proses pendidikan politik; 2) program dan materi pendidikan politik; dan 3) pendidikan politik yang berdampak pada kesadaran dan kepribadian politik masyarakat.

Teori Ruslan terkait pendidikan politik menjadi gagasan fundamental dalam memahami eksistensi Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Bandung. Teori pendidikan politik Ruslan digunakan dalam penelitian karena indikator-indikator yang ada sesuai dengan fenomena politik yang akan dikaji. Selain itu, dengan menggunakan teori Ruslan sebagai acuan, peneliti dapat mengeksplor secara mendalam mulai dari proses, tahapan, hingga ke dampak yang dihasilkan dari proses pendidikan politik kepada pemilih muda yang dilakukan, khususnya terkait Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Bandung. Selain memperdalam secara teoritis, dalam mengkaji pelaksanaan pendidikan politik pemilih muda oleh KPU Kota Bandung melalui Rumah Pintar Pemilu tentu menjadi penting untuk turut mengetahui program pendidikan politik yang dilaksanakan; tantangan, dan hambatan dalam pelaksanaan; serta dampaknya pada kesadaran dan kepribadian politik pemilih muda khususnya menjelang pemilu 2024.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang sejalan dengan fokus penelitian ini, di mana penelitian terdahulu juga memfokuskan pada Rumah Pintar

Pemilu (RPP) dan pendidikan politik bagi para pemilih. Penelitian pertama dengan judul “Pelaksanaan Program Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Pemilih (Studi pada Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Pariaman” oleh Sari dan Rafni (2020). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta studi dokumentasi. Lokasi penelitian berada di Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman. Dalam uji keabsahan sumber, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Dengan cukup berfokus pada pemilih pemula, hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi RPP sebagai sarana pendidikan politik bagi para pemilih masih menghadapi beberapa kendala seperti ruangan yang tidak memadai, aksesibilitas RPP yang jauh sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui keberadaannya, dan minimnya tingkat antusiasme masyarakat untuk datang ke Rumah Pintar Pemilu (Sari & Rafni, 2020). Karena hasil temuan tersebut, KPU Kota Pariaman mencari alternatif lain untuk melakukan pendidikan politik seperti melakukan kegiatan KPU *Goes to School/Campus*, mengundang pelajar untuk datang ke RPP, sosialisasi melalui pentas seni, pemilu *run*, dan sosialisasi serta pendidikan politik untuk tidak melakukan golput; politik uang; dan SARA (Sari & Rafni, 2020).

Penelitian kedua yang berjudul

“Strategi KPU Kota Sukabumi dalam Memberikan Pendidikan Politik kepada Pemilih Melalui Rumah Pintar Pemilu Tahun 2019” oleh Reza, Amirullah & Mulyadi (2020). Penelitian ini berangkat pada fenomena masyarakat Kota Sukabumi yang masih belum memahami urgensi hak pilihnya dalam pemilu. Hal ini ditunjukkan melalui data surat suara yang tidak sah atau pemilih yang tidak menyumbangkan hak pilihnya dengan total 32.440 suara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan dokumen pendukung lainnya. Teori yang digunakan dalam penelitian mengacu pada teori model strategi Mintzberg (2003) yang merujuk pada tiga komponen penting dalam efektivitas strategi: tujuan; kebijakan; dan program. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa selain menjadi sarana pendidikan politik, Rumah Pintar Pemilu menjadi sarana bagi komunitas yang bergerak dalam bidang pemilu dan demokrasi untuk membangun gerakan (Reza et al., 2020). Dengan menggunakan teori Mintzberg, penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Sukabumi dalam mengusung program RPP telah menentukan tujuan umum dan khusus Rumah Pintar Pemilu. Kemudian dalam hal kebijakan, KPU Kota Sukabumi melandaskan kebijakan pada PKP Nomor 10 Tahun 2018, di mana RPP merupakan salah satu sarana pendidikan politik. Hanya saja,

dalam aktualisasinya RPP kurang diminati masyarakat Kota Sukabumi sehingga partisipasi masyarakat untuk datang ke RPP sangat minim. Maka dari itu, sebagai solusi mengatasi hambatan dalam Rumah Pintar Pemilu, KPU Kota Sukabumi menggagas program Mobil Cerdas Demokrasi (MOCI) yang bertujuan mendatangi langsung masyarakat untuk melakukan pendidikan politik (Reza et al., 2020).

Penelitian ketiga yang berjudul “Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Politik” oleh Masputri, Rafni & Dewi (2019). Pilkada 2015 di Sumatera Barat menunjukkan fenomena minimnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, hal ini ditunjukkan melalui tidak adanya kabupaten/kota yang mampu mencapai target nasional sebesar 77,5% dan target KPU Provinsi Sumatera Barat sebesar 75%. Penelitian ini berfokus pada Kota Solok, yang pada pilkada 2015 mendapatkan partisipasi pemilih sebesar 70,41%. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder, melalui wawancara; observasi; dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya mensosialisasikan RPP Kota Solok, KPU Kota Solok menempuh beberapa cara seperti: 1) melakukan sosialisasi melalui radio, selebaran

tentang RPP, dan juga melalui *website* KPU Kota Solok; 2) melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah; 3) melakukan kerja sama dengan Fakultas Hukum UMMY Solok; dan 4) mensosialisasikan pemilu 2019 (Masputri et al., 2019). Namun, dalam penelitian ditemukan beberapa hambatan terkait minimnya sumber daya manusia yang mampu mengelola RPP secara penuh. Selain itu, minimnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah masih menjadi hambatan untuk mengoptimalkan peran RPP sebagai sarana pendidikan politik.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan, terdapat beberapa kesamaan yang terletak pada fokus kajian, di mana pendidikan politik dan Rumah Pintar Pemilu menjadi tajuk utama dari penelitian ini. Selain itu, metode penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data menggunakan data primer dan sekunder. Pengambilan data primer akan melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur yang terkait dengan penelitian. Adapun perbedaan dan kebaruan penelitian terletak pada lokasi dan waktu penelitian. Selain itu, penelitian akan dilakukan dengan berfokus pada pendidikan politik segmentasi pemilih muda melalui Rumah Pintar Pemilu menjelang pemilu serentak tahun 2024.

Metode

Metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif akan digunakan dalam penelitian ini. Dalam memperkaya data peneliti memanfaatkan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder dari studi literatur dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang memahami dan bersinggungan langsung dengan Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Bandung, yaitu: Anggota KPU Kota Bandung Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat periode 2019-2023; Kepala Sub Bagian atau Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat. Selain itu, beberapa pemilih muda yang berdomisili di Kota Bandung dan pernah mengunjungi Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Bandung.

Penelitian ini menggunakan model teknik pengolahan data dari Miles dan Huberman (1984), di mana terdapat tiga sistematika yang digunakan untuk melakukan pengolahan dan analisis data, di antaranya: 1) Reduksi Data; 2) Penyajian Data; dan 3) Penarikan Kesimpulan. Selain itu, peneliti juga melakukan proses triangulasi sumber untuk memvalidasi hasil penelitian dari tiap-tiap sumber data.

Pembahasan

Proses Pendidikan Politik Pemilih Muda melalui RPP KPU Kota Bandung

Pendidikan politik jika mengacu pada teori Ruslan (2000), merupakan proses yang berkelanjutan hingga dampaknya dapat dirasakan dalam jangka waktu panjang. Sehingga ada tiga poin penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan pendidikan politik, salah satunya melihat bagaimana proses pendidikan politik tersebut dilakukan. Proses sendiri dapat dipahami sebagai rangkaian yang harus dilakukan sesuai dengan daftar acuan atau pedoman yang telah dibuat, sehingga dalam tiap tahapan dapat dianalisis bagaimana perkembangan dari proses tersebut. Dalam penelitian ini, yang berfokus pada Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kota Bandung, proses pendidikan politik khususnya bagi pemilih muda dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan pengadaan Rumah Pintar Pemilu (Saung Bewara) KPU Kota Bandung secara fisik, dan digitalisasi program RPP.

Proses pendidikan pemilih muda di Kota Bandung sendiri memiliki beragam cara dan bentuk. Metode yang dilakukan juga cenderung berbeda-beda dan dilakukan dengan kurun waktu tertentu. Sosialisasi dan pendidikan politik pemilih muda dengan klasifikasi usia 17-21 tahun di mana mayoritas masih menjalani masa

sekolah atau pendidikan banyak dilakukan dengan program KPU *Goes to School/Campus* atau dengan mengundang para pemilih potensial ini ke lokasi atau acara yang diadakan oleh KPU Kota Bandung. Proses sosialisasi dan pendidikan politik pemilih muda di lingkup KPU Kota Bandung pada dasarnya melibatkan banyak *stakeholder*. Hal ini disebabkan sebagai penyelenggara pemilu, KPU Kota Bandung memiliki ruang gerak dan waktu yang terbatas. Dengan luas wilayah dan banyaknya segmentasi pemilih menjadikan KPU Kota Bandung kesulitan untuk mengakses seluruh masyarakat dalam kurun waktu yang sedikit dan sumber daya manusia yang terbatas. Sehingga hal ini disiasati oleh KPU Kota Bandung dengan melakukan kerja sama kelembagaan seperti dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), SMA/SMK/Sederajat, guru-guru, hingga melibatkan orang tua para pemilih muda untuk memastikan pendidikan politik tidak hanya dilakukan pada momen-momen tertentu yang diselenggarakan oleh KPU Kota Bandung, namun terus menerus dilakukan dalam jangka panjang oleh pihak-pihak lain.

Namun, karena keterbatasan waktu, lokasi, dan anggaran yang dimiliki oleh KPU Kota Bandung, sosialisasi dan pendidikan politik dengan mendatangi tempat atau acara yang melibatkan pemilih muda tidak

bisa dilakukan secara masif dan terus menerus. Sehingga metode lain digunakan untuk memastikan bahwa peningkatan wawasan, informasi kepemiluan, dan untuk mewujudkan pemilih muda yang cerdas, pengadaan Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kota Bandung baik secara fisik maupun digital (*online*) dilaksanakan. Dengan adanya RPP, proses pendidikan politik dan pemberian informasi mengenai demokrasi dan kepemiluan kepada pemilih muda KPU Kota Bandung dapat dilakukan kapanpun.

Saung Bewara KPU Kota Bandung

Saung Bewara Pemilu di Kota Bandung aktualisasinya sudah sesuai dengan arahan dari petunjuk teknis yang dikeluarkan KPU RI. Tujuan utama dibentuknya Saung Bewara adalah untuk memastikan bahwa pelayanan dan penyediaan informasi terkait demokrasi dan kepemiluan selalu bisa dilakukan dan diberikan oleh KPU Kota Bandung kepada pemilih sesuai dengan hari serta jam kerja KPU Kota Bandung. Jenis informasi yang ada di RPP KPU Kota Bandung sendiri terbagi menjadi dua, yaitu informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan. Permintaan data dan informasi seputar kepemiluan di Kota Bandung cukup banyak, biasanya data yang diminta adalah informasi mengenai jumlah DPT, informasi dapil, jumlah perolehan suara, atau informasi yang sifatnya lebih teoritis atau terkait dengan pemahaman pemilih,

sehingga biasanya banyak permintaan wawancara.

Sejalan dengan hal ini, berdasarkan wawancara bersama pemilih muda yang pernah berkunjung ke Saung Bewara KPU Kota Bandung, informasi yang seringkali diajukan biasanya berbentuk wawancara terkait demokrasi dan kepemiluan. Di mana pihak KPU Kota Bandung akan menjelaskan proses pemilihan, kemudian menjelaskan bagaimana partisipasi pemilih muda dalam pemilu menjadi penting dalam kemajuan demokrasi di Indonesia.

Saung Bewara Pemilu sendiri menyediakan beragam sarana prasarana yang menunjang proses sosialisasi dan pendidikan politik kepada pemilih muda. Dimulai dengan pengadaan buku-buku yang terkait dengan demokrasi serta informasi kepemiluan, monitor yang dapat menampilkan informasi, data, dan juga video, kemudian terdapat infografis terkait KPU, sistem pemilu, maket simulasi atau denah TPS. Melalui penyediaan fasilitas dan sarana prasarana ini, pemilih muda yang berkunjung ke Saung Bewara mampu memperoleh informasi dan pemahaman dasar mengenai kepemiluan dengan mudah, bahkan dengan hanya membaca. KPU Kota Bandung memfasilitasi bahan bacaan dan beberapa infografis memang untuk memastikan bahwa ketika datang ke Saung Bewara, para pemilih khususnya pemilih muda tidak merasa jenuh dan untuk mendorong minat

serta keingintahuan para pemilih terkait KPU, pemilu dan demokrasi.

Fasilitas sarana dan prasarana mendasar yang ada di Saung Bewara KPU Kota Bandung ini secara garis besar telah sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam buku panduan Rumah Pintar Pemilu KPU RI (KPU RI, 2015). Hanya saja memang dalam aktualisasinya, beberapa aspek perlu penyesuaian dengan keadaan lokasi di KPU Kota Bandung. Pengadaan Saung Bewara KPU Kota Bandung jika berdasarkan perspektif pemilih muda memang sangat bermanfaat dan menarik antusiasme dalam memperdalam pemahaman terkait demokrasi dan kepemiluan. Namun memang suasana dan kondisi ruangan kurang memadai untuk melakukan beberapa kegiatan yang lebih mendalam selain proses wawancara atau diskusi aktif. Sejalan dengan hal ini, KPU Kota Bandung juga menyadari bahwa lingkungan yang ada belum mendukung pengoptimalisasian pendidikan politik melalui Rumah Pintar Pemilu, audiens dan ruang gerak yang terbatas menjadikan KPU cukup kesulitan jika melakukan pelayanan atau pendidikan politik dalam skala besar kepada para pemilih muda yang berkunjung.

Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Bandung

KPU RI menganjurkan bahwa untuk perlu adanya digitalisasi Rumah Pintar Pemilu sebagai salah satu metode pendidikan

politik, digitalisasi RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan serta mendorong RPP yang lebih efisien dan juga atraktif bagi para pemilih atau pengunjung. Digitalisasi RPP KPU Kota Bandung dilakukan dengan memanfaatkan monitor layar sentuh yang berisikan data dan informasi kepemiluan yang secara umum bisa diakses oleh masyarakat bahkan melalui *website* KPU Kota Bandung.

Hanya saja dalam praktiknya, digitalisasi RPP KPU Kota Bandung ini masih mengalami beberapa kendala. Operasionalisasi dari RPP secara digital masih belum optimal karena kurangnya SDM di KPU Kota Bandung yang mampu mengoperasikan monitor layar. Laporan Pelayanan Informasi Publik KPU Kota Bandung Tahun 2021 mencatat bahwa permasalahan sumber daya manusia yang masih menjadi hambatan bagi digitalisasi data dan informasi di KPU Kota Bandung (KPU Kota Bandung, 2021). Selain itu, data-data yang baru *ter-input* dalam *website* maupun monitor layar sentuh masih bersifat mendasar dan identik dengan informasi kelembagaan KPU Kota Bandung, belum memuat informasi kepemiluan secara general. Sehingga bagi pemilih muda yang mencari informasi terkait pemilu dan demokrasi masih banyak mengandalkan cara-cara konvensional. Pemanfaatan teknologi dan proses digitalisasi RPP

sebagai sarana pendidikan politik bagi pemilih bukan hanya dilaksanakan di KPU Kota Bandung, melainkan hampir di seluruh tingkatan KPU, namun hampir sebagian besar masih belum optimal dalam proses aktualisasinya.

Digitalisasi informasi politik memang menjadi salah satu terobosan yang cukup diperhitungkan pada era modern ini. Mayoritas masyarakat lebih menyukai informasi yang didapatkan melalui perangkat atau *gadget* dibandingkan dengan langsung berkunjung ke tempat untuk mendapatkan informasi, efektivitas waktu dan biaya juga menjadi pertimbangan mengapa masyarakat lebih erat dengan digitalisasi informasi daripada cara-cara yang konvensional. Penyebaran informasi politik melalui media sosial atau internet pada dasarnya menimbulkan dampak positif karena percepatan informasi dan pembentukan karakteristik pemilih cerdas mampu didorong dengan cukup masif melalui pemanfaatan teknologi. Namun, di sisi lain ancaman *hoax*, ujaran kebencian, hingga branding politik yang buruk justru dapat berdampak pada rendahnya minat masyarakat untuk memahami fenomena politik, terutama pada musim pemilu.

KPU Kota Bandung pada dasarnya telah menerapkan pemanfaatan teknologi dan media sosial sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik. Namun, memang

dalam beberapa aspek masih belum optimal. Misal, dalam penyebaran informasi kelembagaan KPU Kota Bandung, informasi tahapan pemilihan dapat dikatakan telah disediakan di *website* dan media sosial KPU Kota Bandung. Namun, wawasan pemilihan bagi para pemilih yang sifatnya lebih fundamental dan krusial bagi pembentukan karakteristik pemilih cerdas belum banyak difasilitasi oleh KPU Kota Bandung. Hal ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Kota Bandung karena kurangnya perhatian khusus terhadap hal-hal yang dianggap sekunder, KPU Kota Bandung cenderung berfokus pada agenda yang memiliki urgensi tinggi yang menyangkut teknis pelaksanaan pemilu.

Program dan Materi Pendidikan Politik Pemilih Muda melalui RPP KPU Kota Bandung

Ruslan (2000) menjelaskan bahwa pendidikan politik hakikatnya merupakan transfer wawasan, informasi terkait muatan-muatan politik kepada sasaran dari pendidikan politik (dalam Handoyo & Lestari, 2017). Sehingga berdasarkan hal ini perlu program dan materi tertentu yang menjadi landasan dari pendidikan politik. Namun, tentunya untuk memastikan terwujudnya kesadaran dan kepribadian politik, program dan materi yang ada perlu disesuaikan dengan sasaran dari pendidikan politik. Ada beberapa program dan materi pokok yang perlu disediakan

oleh RPP berdasarkan dengan pedoman RPP KPU RI. Namun, selain menyediakan program dan materi yang sesuai dengan anjuran KPU RI, dalam aktualisasinya RPP KPU Kota Bandung yang mayoritas pengunjunnya adalah pemilih muda, seringkali menyesuaikan materi politik dengan kebutuhan atau permintaan.

Sejarah Pemilu

Materi pertama yang harus disediakan oleh RPP KPU Kota Bandung sesuai dengan pedoman RPP KPU RI ialah materi terkait sejarah pemilu. Alasan mengapa sejarah pemilu menjadi salah satu materi pokok dari pendidikan politik melalui RPP adalah karena kemajuan demokrasi di Indonesia sendiri pada dasarnya dimulai ketika pemilihan umum dilakukan, sehingga sejarah terkait pemilu rasanya memiliki urgensi penting dalam pemahaman fundamental pemilih muda dalam konteks demokrasi dan pemilihan di Indonesia.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan pemilih muda, materi yang tersedia di RPP terkait sejarah pemilu menjadikan pemilih lebih mengetahui bagaimana perkembangan pemilu dari awal pelaksanaannya hingga pemilu di tahun 2024 walaupun tidak secara komprehensif berdasarkan rentang waktu (Wawancara dengan Pemilih Muda AY, 2024). Kompleksitas dari dinamika sejarah pemilihan di Indonesia pada dasarnya memang

membuat pemilih khususnya pemilih muda kurang berfokus pada pemilu dalam rekam jejak historis. Hal ini terbilang wajar karena perkembangan kepemiluan di Indonesia terjadi dalam kurun waktu yang panjang dimulai dari awal kemerdekaan hingga pada tahun 2024, belum lagi dengan dilaksanakannya dua jenis pemilu, yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden-wakil presiden. Sehingga jika dianalisis lebih lanjut, materi yang disajikan oleh RPP KPU Kota Bandung terkait sejarah pemilu di Indonesia memang perlu diketahui oleh pemilih muda sebagai wawasan tambahan, namun dengan ukuran atau batas tertentu. Artinya, muatan sejarah pemilu memang penting, tapi tidak secara rinci dipaparkan kepada pemilih muda, karena akan terlalu berat bagi pemilih muda yang notabene masih awam terhadap hal-hal bersifat politik.

Pentingnya Pemilu dan Demokrasi

Materi terkait pentingnya pemilu dan demokrasi yang diusung oleh RPP KPU Kota Bandung merupakan salah satu materi mendasar dan materi kunci yang berperan besar terhadap kesadaran dan pemahaman politik pemilih muda. Poin utama mengapa materi ini memegang andil besar adalah karena tanpa pemahaman yang baik terkait urgensi dilaksanakannya pemilu, maka kontribusi pemilih muda dalam pemilu dapat menurun

baik secara angka maupun secara kualitas. Sedangkan pemilih muda merupakan salah satu pemilih strategis yang menyumbang DPT terbanyak di pemilu 2024. Jika pemilih muda yang merupakan agen perubahan dan generasi penerus bangsa minim kontribusi dalam agenda kenegaraan atau menganggap bahwa pemilu hanya formalitas belaka dan tidak berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari, maka esensi dilaksanakannya pemilu akan hilang dan demokrasi di Indonesia akan mengalami degradasi. Selain itu, dibandingkan dengan materi RPP lainnya, materi terkait pentingnya pemilu dan demokrasi dapat lebih muda disampaikan karena tidak menyangkut hal-hal yang sifatnya teoritis dan sistematis, namun lebih ke arah konseptual serta pembentukan logika berpikir pemilih muda terhadap perannya sebagai warga negara.

Sistem Pemilu

Setelah pemilih memahami makna serta urgensi pemilu dan demokrasi, maka tahapan pendidikan politik selanjutnya yang lebih komprehensif masuk ke dalam proses pemilihan dan tata kelola pemilu di Indonesia. Pada dasarnya pemahaman mengenai sistem pemilu merupakan aspek yang cukup krusial karena dalam praktiknya sistem pemilu yang digunakan di Indonesia akan berdampak pada model atau jumlah calon yang akan dipilih, serta

berpengaruh pada bagaimana tata cara untuk memilih. Di RPP KPU Kota Bandung telah disediakan informasi dan materi jenis sistem pemilu yang ada di dunia dan yang digunakan di Indonesia.

Penjelasan terkait sistem pemilu kepada pemilih muda tidak terlalu berfokus pada tipologi sistem pemilu yang ada di dunia, melainkan lebih menitikberatkan terhadap sistem pemilu yang diaplikasikan di Indonesia, yaitu sistem proporsional terbuka. Hal ini ditunjukkan dari sosialisasi dan pendidikan politik oleh KPU Kota Bandung kepada pemilih muda mengenai pemilu legislatif.

Pengejawantahan materi sistem pemilu ini memang pada dasarnya harus dimodifikasi sedemikian rupa agar mudah dicerna oleh pemilih muda yang mayoritas awam terhadap istilah-istilah politik, sehingga KPU Kota Bandung seringkali mensiasatinya dengan menjelaskan proses pemilu legislatif dengan cukup rinci kepada pemilih muda. Sedangkan untuk pilpres, kemungkinan dua putaran mulai muncul kembali pada pemilu 2024 karena terdapat tiga calon capres dan cawapres. Namun, dibandingkan dengan pileg, masyarakat khususnya pemilih muda cenderung lebih mudah memahami sistem pemilu presiden, oleh karena itu seringkali fokus sosialisasi dan pendidikan pemilih lebih banyak berpusat pada penyuluhan pileg. Menurut perspektif pemilih muda, pileg jauh lebih membingungkan dan rumit

dibandingkan dengan pilpres, sehingga biasanya mereka memanfaatkan dua hal untuk mencoblos caleg, yaitu “partai” dan “pamor caleg”. Para pemilih muda dapat melihat daftar caleg yang diusung partai politik karena sistem pemilu yang digunakan merupakan sistem proporsional terbuka, sehingga memberikan kemudahan bagi pemilih muda untuk menentukan pilihannya.

Tahapan Pemilu

RPP KPU Kota Bandung menyajikan materi serta infografis yang dapat diakses pemilih muda untuk memahami alur tahapan dari tiap proses pemilu baik pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif (DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota), hingga pemilihan kepala daerah seperti gubernur atau bupati/walikota.

Penjelasan terkait tahapan pemilu biasanya dilakukan ketika ada kunjungan ke Saung Bewara, kunjungan ke kampus atau sekolah di Kota Bandung, dan melalui media sosial yang dimiliki oleh KPU Kota Bandung. Hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat khususnya pemilih muda memahami alur yang sedang dilaksanakan KPU dalam konteks pelaksanaan pemilu.

Pemilih muda yang telah mengunjungi RPP ataupun mengikuti laman sosial media KPU Kota Bandung setidaknya memiliki pemahaman mendasar terkait tahapan dan waktu penyelenggaraan

Selain dari KPU sebagai lembaga yang memang berkecukupan dalam kepemiluan, pemilih muda juga mendapatkan informasi terkait tahapan pemilu dari ruang lingkup terkecil yang seperti telah disebutkan sebelumnya yaitu PPK, PPS, KPPS, bahkan melalui RT/RW setempat. Sehingga berdasarkan hal ini dapat dianalisis bahwa materi terkait tahapan penyelenggaraan pemilu pada dasarnya bisa dengan mudah disampaikan oleh *stakeholder* selain KPU, bahkan bisa dengan mudah diakses oleh pemilih muda hanya dengan mencari di internet. Adanya sosialisasi terkait tahapan penyelenggaraan pemilu sejatinya berdampak positif pada pemilih muda, bukan hanya karena menambah wawasan dan kesadaran politik pemilih. Melainkan mendorong pemilih untuk mampu mengikuti alur politik dan pemilu, menarik antusiasme, juga secara aktif ikut serta mengawasi jalannya tahapan pemilu.

Peserta Pemilu

Sosialisasi dan pendidikan politik terkait peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung melalui RPP biasanya dilakukan dengan cara menjelaskan kepada pemilih muda terkait jumlah calon presiden, tokoh-tokoh yang berkontestasi, partai pengusung, partai yang mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu, kemudian juga menjelaskan terkait para caleg

dari partai politik. Menurut KPU Kota Bandung, antusiasme dan wawasan pemilih muda terkait peserta pemilu lebih berfokus pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Banyak dari pemilih muda yang belum mengetahui terkait pemilihan legislatif, sehingga penguatan sosialisasi terkait pemilu legislatif lebih ditekankan dengan memfokuskan pada partai peserta, jumlah dapil, dan cara mencoblos caleg.

Pemilih muda lebih tertarik pada isu dan fenomena pilpres setidaknya karena beberapa hal. *Pertama*, tokoh yang maju menjadi capres dan cawapres merupakan tokoh yang secara general sudah dikenal baik oleh masyarakat. *Kedua*, jumlah calon presiden dan wakil presiden tidak sebanyak calon legislatif, sehingga dengan jumlah yang sedikit, pemilih muda lebih mudah mencari informasi dan menentukan pilihan. *Ketiga*, kurang kuatnya penokohan calon legislatif. Pemilih muda seringkali menjatuhkan pilihannya terhadap caleg atau partai peserta pemilu yang memiliki pamor tinggi di masyarakat karena ketidaktahuan akan karakter dan visi misi calon.

RPP KPU Kota Bandung dan para SDM-nya telah mengupayakan sosialisasi kepada pemilih muda terkait eksistensi pileg dan bagaimana partai politik peserta pemilu serta caleg-caleg yang diusungnya merupakan bagian dari kontestasi pemilu dan sangat penting

bagi pemilih muda untuk turut mencoblos caleg-caleg tersebut saat pelaksanaan pemilu. Namun, partai politik dan para calegnya juga memegang peran penting dalam melakukan *branding* agar dikenal oleh pemilih-pemilih muda, hal inilah yang harus dilakukan pada masa kampanye. Materi terkait peserta pemilu ini menjadikan pemilih muda tidak hanya terfokus pada pilpres namun juga berpartisipasi dalam pileg. Jika pengetahuan pemilih muda terkait peserta pemilu meningkat, maka probabilitas peningkatan partisipasi pileg yang cenderung lebih rendah dari pilpres bisa diupayakan.

Proses Pemilihan

Materi sosialisasi dan pendidikan politik selanjutnya yang tersedia di RPP baik secara langsung maupun digital adalah terkait prosedur pemilihan atau pemungutan suara. Proses pemilihan menjadi salah satu pemahaman yang cukup krusial bagi para pemilih muda, karena berkaitan dengan tata cara pencoblosan dan menyangkut sah atau tidaknya suara yang diberikan oleh pemilih. Secara sederhana RPP KPU Kota Bandung menggambarkan proses pemilihan dengan cara melakukan tahapan 5D, yaitu: 1) Datang (pemilih mendatangi TPS yang terdaftar); 2) Daftar (pemilih melakukan pendaftaran untuk mendapat surat suara); 3) Dicoblos (surat suara dicoblos); 4) Dimasukkan (surat suara dilipat dan dimasukkan ke kotak suara); dan 5)

Dicelup (pemilih memasukkan jari ke tinta sebagai bukti telah mencoblos). Selain dengan infografis dan arahan 5D, KPU Kota Bandung juga turut menjelaskan bagaimana proses pemilihan dilakukan dengan menunjukkan maket atau miniatur TPS yang tersedia di RPP KPU Kota Bandung, sehingga pemilih dengan mudah dapat melihat dan mengamati bentuk TPS, tugas pihak yang terlibat dalam pemilu, dan alur dari pemungutan hingga perhitungan suara.

Profil Penyelenggara

Di RPP KPU Kota Bandung, penjelasan terkait profil penyelenggara pemilu disusun melalui infografis yang menjelaskan secara historis perkembangan KPU secara kelembagaan. Perkembangan ini dimulai ketika awal mulanya KPU disebut sebagai PPI (Panitia Pemilihan Indonesia), kemudian berubah menjadi LPU (Lembaga Pemilihan Umum) di tahun 1971-1997, dan pada akhirnya menjadi KPU ketika pelaksanaan pemilu tahun 1999 (KPU Kota Bandung, 2022). Bagi pemilih muda yang awam dengan politik, memahami KPU secara kelembagaan dapat dikatakan cukup kompleks. Sehingga biasanya, pengenalan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dilakukan dengan menjelaskan tugas, fungsi, kewajiban, dan wewenang KPU.

Melalui pendidikan politik RPP terkait materi penyelenggara inilah setidaknya pemilih muda

mampu mengetahui karakteristik kelembagaan KPU berdasarkan tiga elemen utama, yaitu: Nasional, Tetap, dan Mandiri (KPU RI, 2022). Dalam konteks “Nasional”, KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat struktural dan hierarkis. Kemudian dalam konteks “Tetap”, KPU merupakan lembaga yang sifatnya permanen, bukan kontemporer atau situasional hanya dalam periode 5 tahun sekali. KPU memiliki tiga rentang waktu dalam pelaksanaan pemilu, yaitu: sebelum (perencanaan), saat pemilu, dan sesudah (evaluasi). Pemilih muda melalui materi penyelenggara pemilu ini kemudian dapat menganalisis bahwa kehadiran KPU penting bukan hanya saat pemilu, namun peran dan program KPU terus berjalan bahkan setelah pemilu selesai dilaksanakan. Terakhir, terkait aspek “mandiri”, hakikatnya KPU merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain termasuk pemerintah yang berkuasa. KPU juga bebas dari intervensi pemangku kepentingan seperti partai politik peserta pemilu. Hal ini kemudian yang menjadi penting untuk diketahui pemilih muda. Bahwa kemandirian KPU merupakan salah satu aspek krusial, di mana ketika KPU menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga yang “mandiri”, integritas dan kualitas kepemiluan dapat lebih muda untuk diwujudkan.

Dampak Sosialisasi dan Pendidikan Politik melalui RPP KPU Kota Bandung terhadap Kesadaran dan Kepribadian Politik Pemilih

Ruslan (2000) merumuskan bahwa pendidikan politik merupakan bagian dari proses sosialisasi dan karenanya perlu dilakukan secara rutin agar nilai-nilai yang menjadi muatan dari proses pendidikan politik dapat tertanam kepada pemilih, dan pada akhirnya pemilih mampu menjadi warga negara yang secara penuh kesadaran merasa menjadi bagian dari negara dan segala dinamika proses politik yang melingkupinya. Jika mengkaji dampak jangka panjang dari proses sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan secara terus menerus, setidaknya ada dua hal yang muncul dari masyarakat: 1) Kesadaran dan pemahaman terkait fenomena politik; dan 2) Masyarakat mampu mengambil keputusan dan tindakan yang bersifat politis, sehingga kepribadian politik terbentuk.

Pembentukan kesadaran dan kepribadian politik menjadi urgensi penting bagi lembaga penyelenggara pemilu dalam memastikan kontribusi masyarakat dalam pemilu meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara sederhana, sosialisasi dan pendidikan politik oleh KPU ditujukan untuk menginformasikan segala informasi, fenomena, dan wawasan terkait demokrasi dan kepemiluan kepada masyarakat khususnya warga negara

yang sudah masuk dalam kriteria pemilih. Sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung melalui Rumah Pintar Pemilu bukan hanya berdampak terhadap pemahaman pemilih muda terkait politik, demokrasi, dan pemilu. Namun, lebih dari itu terdapat perubahan pandangan, kesadaran, juga andil pemilih muda dalam konteks kepemiluan di Indonesia.

Pengetahuan Pemilih Muda Seputar Pemilu dan Demokrasi

Berdasarkan diskusi dengan pemilih muda yang telah mengunjungi Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Bandung setidaknya dapat diketahui bahwa pemilih muda yang berkunjung ke RPP KPU Kota Bandung dengan rentang usia 17-21 tahun masih cukup awam dengan fenomena politik, khususnya terkait demokrasi dan kepemiluan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: *pertama*, pemilih muda yang masih duduk di bangku sekolah memiliki akses yang terbatas terhadap ruang lingkup politik. *Kedua*, perolehan informasi melalui sosial media menimbulkan keraguan. Pemilih muda merupakan generasi yang lebih akrab dengan teknologi dan juga internet, oleh karena itu penggunaan sosial media menjadi konsumsi sehari-hari. Namun, di tengah maraknya penyelenggaraan pemilu 2024, pemilih muda yang mendapatkan informasi dan wawasan politik melalui sosial media seringkali kebingungan terhadap

informasi yang beredar. *Ketiga*, stigma negatif terhadap politik dan aktornya. Banyaknya pemberitaan terkait kasus yang menjerat para politisi menjadikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap politisi dan pemerintahan menurun.

Pemahaman fundamental terkait rasa memiliki terhadap bangsa, partisipasi aktif dalam proses pesta demokrasi, pemahaman urgensi demokrasi bagi Indonesia, makna dan manfaat dari keikutsertaan dalam pemilu, hingga wawasan terkait lembaga penyelenggara pemilu belum dipahami secara mendalam oleh pemilih muda. Informasi yang diterima dan setidaknya diketahui oleh pemilih muda seputar waktu pemilu, calon presiden dan wakil presiden beserta nomor urutnya, kemudian rekam jejak yang mudah didapatkan melalui media sosial, dan hal-hal yang sifatnya bergantung pada konteks, bukan konseptual. Sehingga KPU, khususnya KPU Kota Bandung memiliki andil penting bagi penanaman kesadaran dan pembentukan kepribadian pemilih muda melalui berbagai media, termasuk Rumah Pintar Pemilu.

Kesadaran dan Keikutsertaan Pemilih Muda dalam Politik

Terdapat perubahan yang cukup signifikan terhadap kesadaran dan keikutsertaan pemilih muda yang telah berkunjung ke RPP KPU Kota Bandung. Perubahan ini dapat diidentifikasi berdasarkan pola pikir atau pemahaman yang sebelumnya

masih abai terhadap isu-isu politik dan kepemiluan kemudian berubah menjadi lebih peka dan mulai awas terhadap fenomena politik. Perubahan kesadaran pemilih muda sebelum dan sesudah berkunjung ke RPP atau sebelum mendapatkan pendidikan politik dari KPU Kota Bandung dapat terlihat melalui beberapa hal.

Pertama, pemilih muda pada mulanya belum memahami apa itu pendidikan politik atau muatan-muatan politik apa yang diberikan dalam prosesnya. Pasca kunjungan dan arahan dari pihak KPU Kota Bandung, setidaknya pemilih muda mulai memahami bahwa pendidikan politik bukan hanya sekedar membahas terkait hubungan pemerintah dengan masyarakat. Namun, pendidikan politik dilakukan untuk memastikan bahwa tiap-tiap warga negara mampu merasa menjadi bagian dari proses politik, mengetahui peran penting mereka dalam perkembangan demokrasi.

Kedua, banyak dari pemilih muda yang sebelumnya menganggap bahwa peran mereka dalam politik khususnya kontestasi kepemiluan tidak memiliki dampak terhadap kemajuan bangsa, sehingga tindakan GolPut dianggap lumrah. Namun, KPU Kota Bandung melalui Rumah Pintar Pemilu berusaha untuk mengubah pemikiran tersebut dengan menjelaskan kepada pemilih muda bahwa mereka memiliki andil penting dalam pemilu.

Ketiga, pemilih muda yang belum pernah mengunjungi atau bertinteraksi secara langsung dengan KPU Kota Bandung belum memahami fungsi dan tugas KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu secara komprehensif. Pemilih muda memahami KPU hanya sebatas pihak penyelenggara pemilu, namun tidak memahami secara fungsional bahwa KPU melakukan tugas lebih dari “pelaksanaan pemilu”. Pemilih muda baru mengetahui bahwa KPU melakukan sosialisasi dan pendidikan politik ke berbagai segmentasi masyarakat, memberikan pemahaman bukan hanya terkait kepemiluan namun menanamkan minat dan antusiasme pemilih untuk turut andil dalam fenomena politik.

Keempat, pemilih muda memahami bahwa suara yang dimiliki merupakan salah satu sarana untuk menentukan perubahan bagi bangsa. Pendidikan politik yang dilakukan melalui RPP KPU Kota Bandung mendorong kesadaran pemilih muda terhadap pentingnya peran dan suara yang mereka miliki. Selain ikut serta dalam pemilu dengan melakukan pencoblosan, pemilih muda juga dibentuk dan didorong untuk berpartisipasi sebagai agen sosialisasi dan pendidikan politik.

Peran Pemilih Muda dalam Fenomena Politik dan Pemilihan Umum di Kota Bandung

Dari kehadiran RPP pula pemilih muda mampu mengetahui,

memahami terkait makna demokrasi, urgensi dilaksanakannya pemilu, serta turut andil berpartisipasi secara aktif dalam pemilu 2024. Selain itu, pembentukan pemilih cerdas juga dapat direalisasikan melalui RPP KPU Kota Bandung, mengingat pemilih muda menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang mengancam dan membahayakan demokrasi di Indonesia seperti penggunaan uang atau materi bernilai lainnya dalam praktik jual beli suara, bahayanya GolPut bagi demokrasi di Indonesia, adanya serangan fajar yang perlu mereka hindari, dan pemilih muda mampu memberikan suaranya pada proses pemilu dengan pertimbangan-pertimbangan yang mereka miliki, bukan hanya berdasarkan ajakan atau tekanan pihak tertentu.

Berdasarkan wawancara dengan pemilih muda yang telah mengunjungi RPP KPU Kota Bandung. Peningkatan wawasan dan kesadaran akan pentingnya berkontribusi dalam politik dan kontestasi pemilu telah berkembang sejak kunjungan ke Saung Bewara. Sehingga berdasarkan kesadaran ini, pemilih muda juga mampu membuat keputusan-keputusan politis yang berdasarkan pertimbangan rasional, kontribusi aktif dalam pemilu 2024, serta menjadi agen sosialisasi dan pendidikan politik dimulai dari ruang lingkup terkecil. Program pendidikan politik melalui RPP yang dilakukan KPU Kota Bandung setidaknya memberikan pengaruh terhadap tindakan atau kepribadian politik pemilih muda melalui tiga hal, di

antaranya: *pertama*, pemilih muda yang sebelumnya berpikiran untuk GolPut dalam pemilu 2024, mempertimbangkan kembali keputusannya, dan pada akhirnya ikut serta mencoblos dalam pemilu 2024 baik dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, maupun dalam pemilihan legislatif.

Kedua, selain mencoblos, partisipasi aktif dari pemilih muda dapat terlihat ketika ambil bagian sebagai panitia atau pengawas dalam pemilu. Salah satu pemilih muda mengambil partisipasi lebih dengan cara menjadi pengawas atau saksi salah satu partai di TPS tempat tinggalnya.

Ketiga, dari pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung, pemilih muda memiliki peran lebih dalam sebagai agen sosialisasi dan pendidikan politik. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak KPU Kota Bandung, pemilih muda yang berkunjung ke RPP biasanya memiliki *project* tertentu terkait demokrasi, sehingga setelah mendapatkan pendidikan politik dari KPU Kota Bandung, mereka merealisasikan informasi yang mereka dapat ke dalam sebuah *project* berupa video, tulisan, bahkan merepresentasikan kembali hal-hal yang didapatkan kepada guru dan teman-teman di sekolah. Melalui hal ini, pembentukan pemilih cerdas dapat didorong dengan lebih efektif karena mengandalkan banyak pihak, bukan hanya KPU Kota Bandung sebagai salah satu agen utama dari

proses pendidikan politik. Sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu pada dasarnya memang ditujukan untuk mendorong pembentukan agen sosialisasi dari kalangan pemilih, khususnya pemilih muda agar terbentuk karakteristik pemilih cerdas.

Sama halnya dengan KPU yang bertugas menyelenggarakan pemilu berdasarkan tiga tahapan, yaitu: sebelum pemilu, saat pemilu, dan sesudah pemilu, pendidikan politik pemilih muda untuk membentuk karakteristik pemilih cerdas juga dicirikan dengan tiga hal (Dinas Kominfo Jawa Timur, 2022). *Pertama*, pemilih muda memiliki kesadaran dan tindakan pada sebelum pelaksanaan pemilu. *Kedua*, pemilih muda secara sadar, tanpa paksaan ikut serta di hari pemilu dilaksanakan. *Ketiga*, pemilih muda terlibat dan secara aktif mengawasi pemilu bahkan pada saat telah selesai dilaksanakan.

Kesimpulan

Untuk mendorong terwujudnya pemilih muda yang cerdas, KPU Kota Bandung melakukan berbagai metode pendidikan politik untuk menanamkan pemahaman dan kesadaran politik pemilih muda, salah satunya dengan Rumah Pintar Pemilu atau Saung Bewara. Penelitian ini berfokus pada pemilih

muda dengan rentang usia 17-21 tahun yang sudah pernah mengunjungi Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Bandung. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bagaimana proses pendidikan politik pemilih muda yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung melalui Rumah Pintar Pemilu dan juga dampaknya pada kesadaran serta kepribadian politik pemilih muda pada pemilu 2024. RPP KPU Kota Bandung sebagai sarana pendidikan politik sudah dijalankan dengan cukup baik dan membawa dampak positif bagi perkembangan wawasan, kesadaran, antusiasme, dan peran para pemilih muda. Namun, dalam aktualisasinya masih banyak aspek atau elemen pendidikan politik yang belum dijalankan secara optimal oleh RPP KPU Kota Bandung. Sehingga, perlu evaluasi dan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan pendidikan pemilih muda melalui RPP dapat berkontribusi dalam pengembangan karakter pemilih cerdas yang mampu memberikan dampak baik bagi perkembangan kepemiluan dan demokrasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Bandung Kiwari. (2019). Aliansi Masyarakat Bandung Nyatakan Diri Golput pada Pilpres 2019. *Kumparan.Com*.
<https://kumparan.com/bandung-kiwari/aliansi-masyarakat-bandung-nyatakan-diri-golput-pada-pilpres-2019->

- 1qstKsTV9t0/4
- Costa, F. (2023). Praktik Politik Uang Terus Terjadi dalam Kampanye di Jabar. *Kompas.Id*. <https://www.kompas.id/baca/politik/2023/12/21/praktik-politik-uang-terus-terjadi-dalam-kampanye-di-jabar>
- Dinas Kominfo Jawa Timur. (2022). *KPU Jatim Ajak Masyarakat Jadi Agen Sosialisasi Kepemiluan 2024*. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/kpu-jatim-ajak-masyarakat-jadi-agen-sosialisasi-kepemiluan-2024>
- Djuyandi, Y. (2018). *Pengantar Ilmu Politik* (Edisi Kedu). Rajawali Pers.
- Handoyo, E., & Lestari, P. (2017). Pendidikan Politik. In *Visipena Journal* (Vol. 7, Issue 1). Percetakan Pohon Cahaya.
- Herdiana, I. (2023). Kekecewaan pada Pejabat Membuat Pemilu 2024 di Kota Bandung Dibayangi Golput. *BandungBergerak*. <https://bandungbergerak.id/article/detail/15581/kekecewaan-pada-pejabat-membuat-pemilu-2024-di-kota-bandung-dibayangi-golput>
- Hidayat, D. (2023). KPK Sebut Sulit Ajak Gen Z Kampanyekan Politik Uang. *RRI.Co.Id*. https://www.rri.co.id/bandung/pemilu/286791/kpk-sebut-sulit-ajak-gen-z-kampanyekan-politik-uang?utm_source=news_terpopuler_widget&utm_medium=i
- internal_link&utm_campaign=General%20Campaign
- KPU Kabupaten Ciamis. (2017). *LAPORAN KEGIATAN PEMBENTUKAN RUMAH PINTAR PEMILU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS*.
- KPU Kota Bandung. (2021). *Laporan Pelayanan Informasi Publik KPU Kota Bandung Tahun 2021*. <https://kota-bandung.kpu.go.id/page/read/46/laporan-pelayanan-informasi-publik-kpu-kota-bandung>
- KPU Kota Bandung. (2022). *Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Bandung*. <https://kota-bandung.kpu.go.id/page/read/55/rumah-pintar-pemilu-kpu-kota-bandung>
- KPU RI. (2015). Pedoman Rumah Pintar Pemilu. In *Jakarta 2015* (Issue 29). https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Buku_Pedoman_Rumah_Pintar_Pemilu.pdf
- KPU RI. (2015). 27 KPU Siap Bentuk Rumah Pintar Pemilu. *Kpu.Go.Id*. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/4359/Setidaknya--27-KPU-provinsi-dan-KPU-kabupaten-kota-yang-menjadi-percontohan--pilot-project--Pusat-Pendidikan-Pemilih-menyatakan-kesiapannya-untuk-membentuk-Rumah-Pintar-Pemilu>
- KPU RI. (2022). Karakter Kelembagaan KPU: Nasional,

- Tetap, dan Mandiri. *Kpu.Go.Id*. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11003/karakter-kelembagaan-kpu-nasional-tetap-dan-mandiri>
- Manik, H. K., Pamungkas, S., Rizkyansyah, F. K., Gumay, H. N., Budhiati, I., Budiman, A., & Ardiantoro, J. (2015). Buku Pedoman pendidikan pemilih. *Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*, 35.
- Masputri, M. E., Rafni, A., & Dewi, S. F. (2019). Upaya Kpu Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik. *Journal of Civic Education*, 2(1), 67–75. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i1.109>
- MKRI. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. In *Undang-Undang Pemilu*.
- Rahmat, B. (2023). Pemilih Muda Gampang Berubah Pilihan, Perlu Strategi Khusus untuk Menggaet di Pemilu 2024. *Inilah.Com*. <https://www.inilah.com/pemilih-muda-gampang-berubah-pilihan-perlu-strategi-khusus-untuk-menggaet-di-pemilu-2024>
- Reza, S. T. A., Amirrullah, M. R., & Mulyadi, A. (2020). Strategi Kpu Kota Sukabumi Dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Pemilih Melalui *Public Knowledge / Volume 1 Issue 2*
■ DOI 10.62771/pk.v1i2.9
Rumah Pintar Pemilu Tahun 2019. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 315–322. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v7i2.3651>
- Santoso, T., & Budhiati, I. (2019). *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan* (Tarmizi, Ed.; First). Sinar Grafika.
- Sari, L., & Rafni, A. (2020). Pelaksanaan Program Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Pemilih (Studi pada Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Pariaman). *Journal Of Civic Education*, 3(1), 119–126.
- Warid, F. (2023). KPU RI Target Partisipasi Pemilih 2024 Diatas 82 Persen. *RRI.Co.Id*. <https://www.rri.go.id/pemilu/263525/kpu-ri-target-paritisipasi-pemilih-2024-diatas-82-persen#:~:text=2019%20tingkat%20partisipasi%20pemilih%20kumulatif,10%2F6%2F2023>